

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran hasil penelitian beserta hipotesis dengan pembahasan pada bagian akhir. Penelitian ini menggunakan alat bantu yakni perangkat lunak SPSS versi 15.0. Adapun penjelasan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

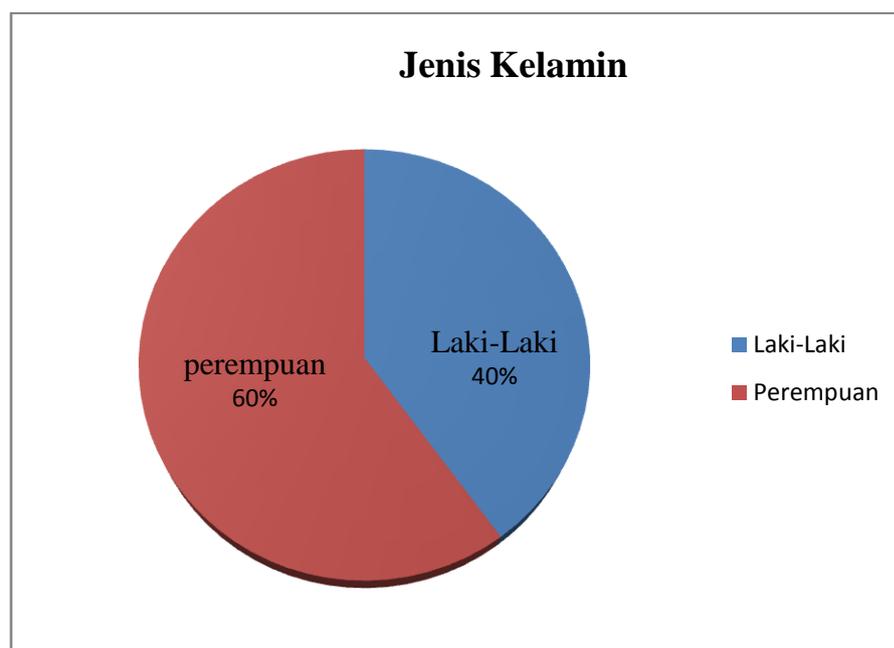
Pada penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah data primer dimana peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Obyek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul yang terdiri dari 100 responden. Peneliti menentukan dan mengambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh hasil sebanyak 100 responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di Kabupaten Bantul yang dilakukan mulai tanggal 26 Desember 2017 - 20 Januari 2018. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *convenience sampling*, yang mana anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010).

2. Demografi Responden

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik responden yang akan diteliti dengan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh melalui perhitungan statistik deskriptif. Dari responden yang diamati penelitian ini meliputi Jenis Kelamin, Usia, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan. Berikut ini hasil dari distribusi frekuensi setiap karakteristik responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar berikut :



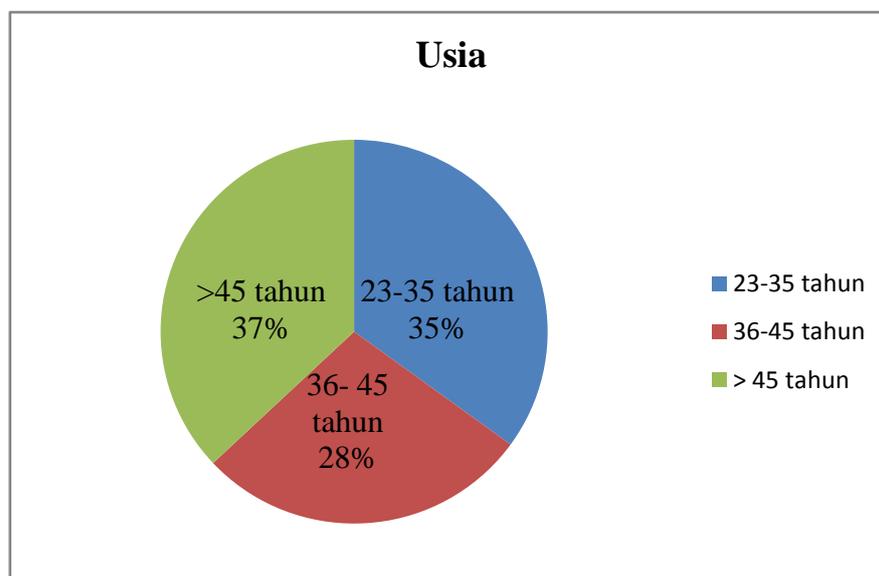
Sumber: Data yang diolah 2018

GAMBAR 4.1
Persentase Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini adalah responden perempuan berjumlah 60 dengan persentase 60% dan responden laki-laki berjumlah 40 dengan persentase 40%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul sebagian besar adalah responden dalam kategori perempuan yaitu sebanyak 60 responden (60%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar berikut:



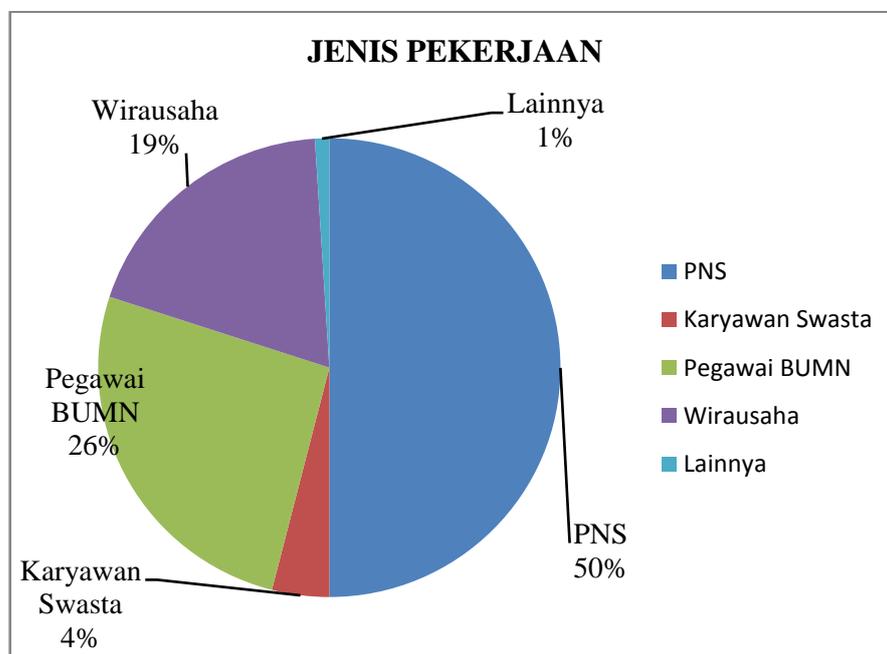
Sumber: Data primer yang diolah, 2017

GAMBAR 4.2
Persentase Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel 4.2 menampilkan responden berdasarkan usia. Usia responden 23-35 tahun tercatat sebanyak 35 dengan persentase 35%, usia 36-45 tahun tercatat sebanyak 28 dengan persentase 28% dan usia >45 tahun tercatat sebanyak 37 dengan persentase 37%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul sebagian besar adalah termasuk responden dalam kategori 23-35 tahun sebanyak 35 responden (35%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada Gambar berikut:



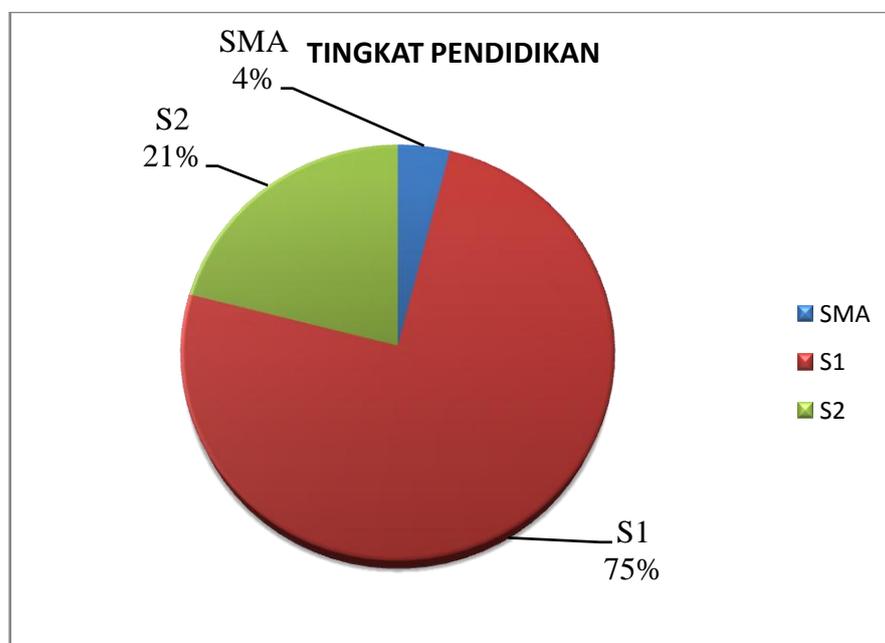
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.3
Persentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan pekerjaan memperoleh hasil bahwa jenis pekerjaan PNS sebanyak 50 dengan persentase 50%, karyawan swasta 4 dengan persentase 4%, pegawai BUMN 26 dengan persentase 26%, wirausaha 19 dengan persentase 19% dan lainnya 1 dengan persentase 1%. Hasil diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden dengan jenis pekerjaan terbyak adalah PNS dengan jumlah 50 orang dengan persentase 50% dan paling sedikit adalah jenis pekerjaan lainnya yaitu 1 orang dengan persentase 1%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Data yang diolah, 2018

GAMBAR 4.4
Persentase Berdasarkan Pendidikan

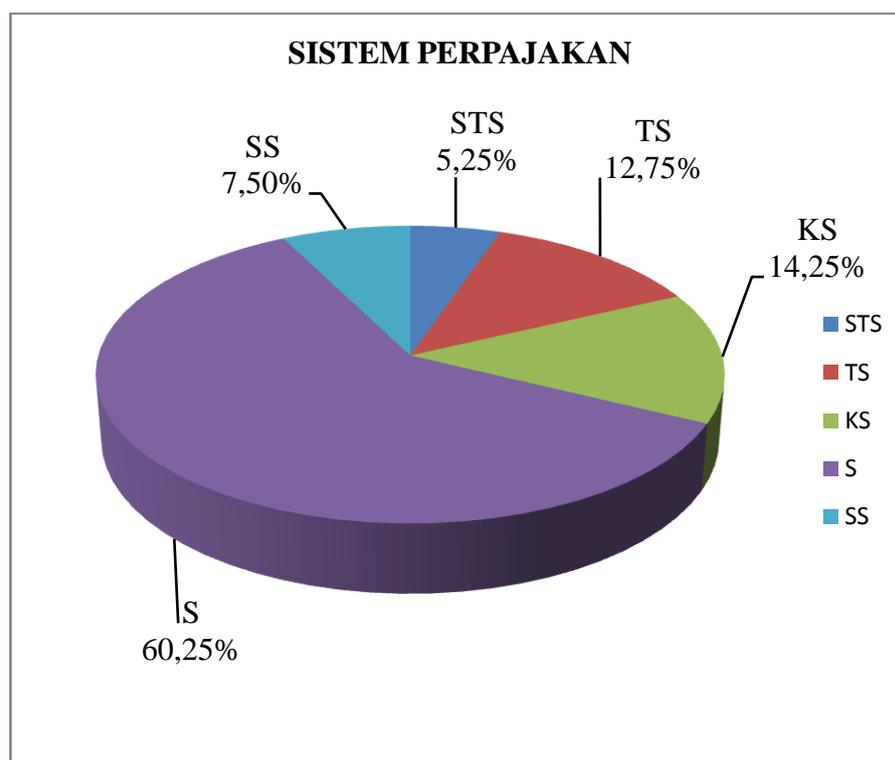
Berdasarkan tabel 4.4 hasil pengelompokan responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA sebanyak 4 orang dengan persentase 4%, memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 75 orang dengan persentase 75%, memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 21 orang dengan persentase 21%. Pendidikan terakhir yang paling banyak yang di tempuh oleh responden di KPP Pratama Bantul yaitu S1 dengan jumlah responden sebanyak 75 orang dengan persentase 75%, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tingkat pendidikan SMA dengan jumlah responden 4 orang dengan persentase 4%.

3. Karakteristik Jawaban Responden Secara Keseluruhan

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik jawaban responden yang akan diteliti dengan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh melalui perhitungan statistik deskriptif meliputi variabel sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, diskriminasi dan penggelapan pajak:

a. Variabel Sistem Perpajakan (X_1)

Persentase jawaban responden pada variabel sistem perpajakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.5

Persentase Jawaban Responden pada Variabel Sistem Perpajakan

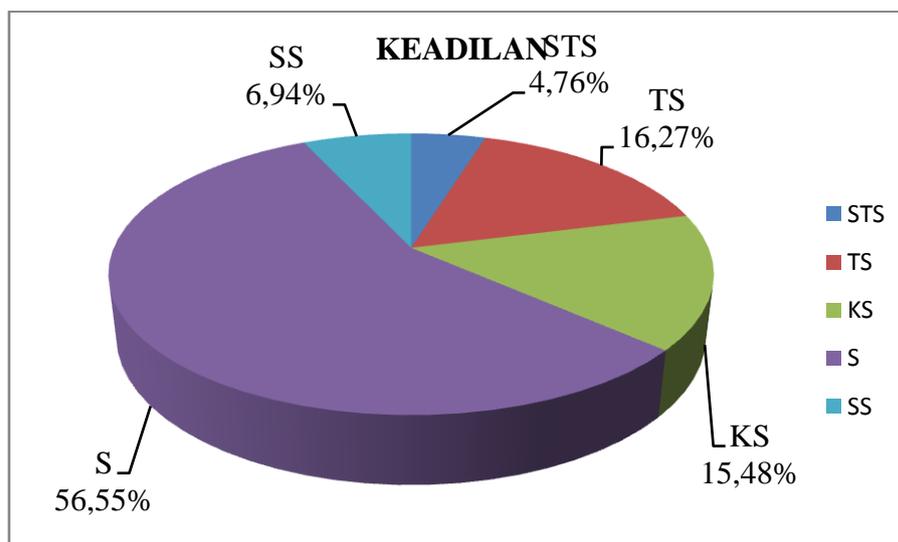
Gambar 4.5 menunjukkan bahwa banyaknya responden untuk variabel sistem perpajakan dari 3 indikator yaitu persepsi sistem perpajakan 2 pertanyaan, prosedur sistem perpajakan 1 pertanyaan, dan sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak 1 pertanyaan. Sehingga total pertanyaan untuk variabel sistem perpajakan terdapat 4 pertanyaan yang

diberikan oleh peneliti. Jawaban menunjukkan bahwa responden setuju dengan prosedur sistem perpajakan saat ini.

Diperoleh jawaban tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 60,25% dan 7,5%, artinya prosedur sistem perpajakan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 67,75% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 5,25% dan 12,75% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 18%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 14,25%.

b. Variabel Keadilan (X_2)

Persentase jawaban pada variabel keadilan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

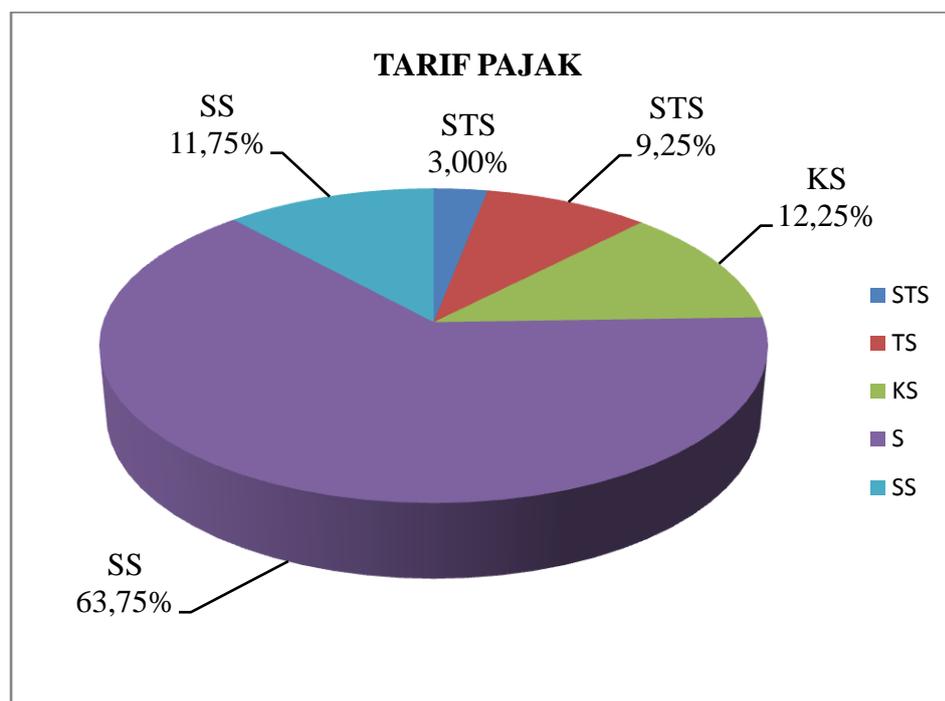
GAMBAR 4.6
Persentase Jawaban Responden pada Variabel Keadilan

Gambar 4.6 menunjukkan banyaknya jawaban responden untuk variabel keadilan dari 4 indikator yaitu manfaat yang diperoleh 1 pertanyaan, kemampuan dalam melakukan pembayaran 1 pertanyaan, keadilan dalam penyusunan Undang-Undang 2 pertanyaan, dan penerapan ketentuan perpajakan 1 pertanyaan. Sehingga total pertanyaan untuk variabel keadilan terdapat 5 pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jawaban menunjukkan bahwa kemampuan membayar sudah ada dalam diri responden.

Diperoleh jawaban tertinggi pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 6,94% dan 56,55%, artinya keadilan yang digambarkan pada diagram tersebut adalah tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 63,49% yang berarti hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 16,27 dan 4,76% yang jika dijumlahkan yaitu 21,03% yang kurang dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 15,48%.

c. Variabel Tarif Pajak (X_3)

Persentase jawaban pada variabel tarif pajak dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Gambar 4.7

Persentase Jawaban Responden pada Variabel Tarif Pajak

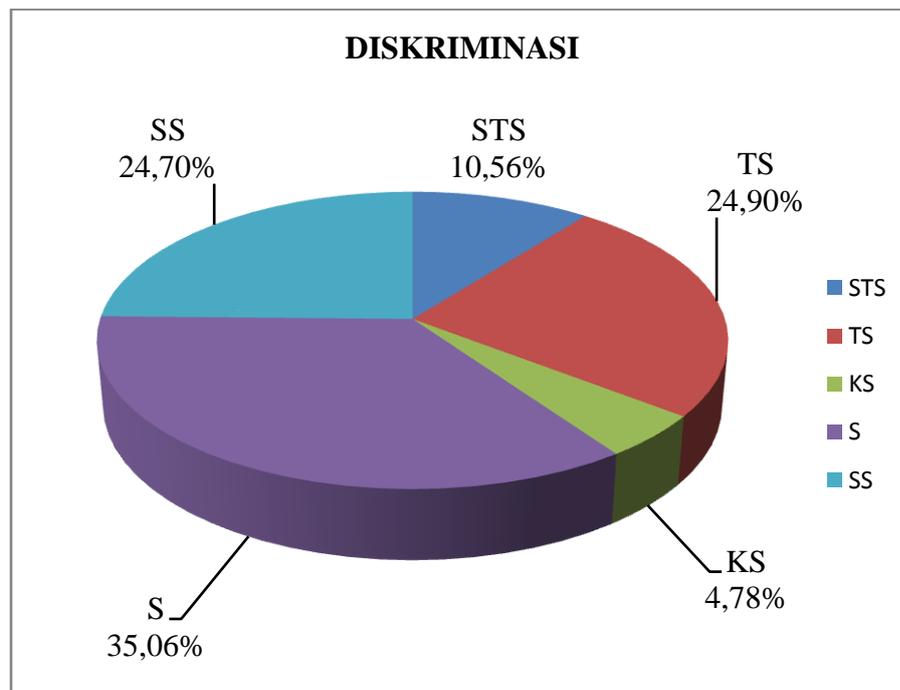
Gambar 4.7 menunjukkan banyaknya jawaban responden untuk variabel tarif pajak dari 3 indikator yaitu kemampuan dalam membayar 1 pertanyaan, pemberlakuan tarif pajak 1 pertanyaan, dan prinsip dalam melakukan pembayaran pajak 2 pertanyaan. Sehingga total pertanyaan untuk variabel tarif pajak terdapat 4 pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jawaban menunjukkan bahwa tarif pajak sudah baik dan sesuai.

Diperoleh jawaban tertinggi pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 11,75% dan 63,75%, artinya tarif pajak yang digambarkan

pada diagram tersebut adalah tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 75,5% yang berarti hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 9,25 dan 3% yang jika dijumlahkan yaitu 12,25% yang kurang dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 12,25%.

d. Variabel Diskriminasi (X₄)

Persentase jawaban pada variabel diskriminasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.8

Persentase Jawaban Responden pada Variabel Diskriminasi

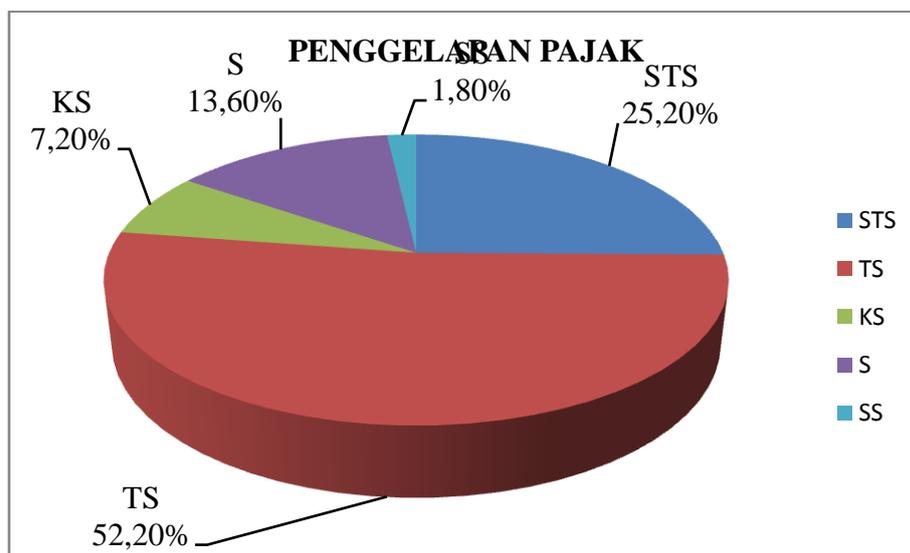
Gambar 4.8 menunjukkan banyaknya jawaban responden untuk variabel diskriminasi dari 2 indikator yaitu diskriminasi atas agama, ras, dan kebudayaan 2 pertanyaan, diskriminasi terhadap hal-hal yang disebabkan

oleh manfaat perpajakan 3 pertanyaan. Sehingga total pertanyaan untuk variabel diskriminasi terdapat 5 pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jawaban menunjukkan bahwa responden tidak merasa terdiskriminasi.

Diperoleh jawaban tertinggi pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 24,70% dan 35,06%, artinya diskriminasi yang digambarkan pada diagram tersebut adalah tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 59,76% yang berarti hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 24,90% dan 10,56% yang jika dijumlahkan yaitu 35,46% yang kurang dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 4,78%.

e. Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Persentase jawaban pada variabel penggelapan pajak dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.9

Persentase Jawaban Responden pada Variabel Penggelapan pajak

Gambar 4.9 menunjukkan banyaknya jawaban responden untuk variabel penggelapan pajak dari 4 indikator yaitu tidak menyampaikan SPT 1 pertanyaan, menyampaikan SPT dengan tidak benar 2 pertanyaan, tidak mendaftarkan diri 1 pertanyaan dan berusaha menyuap fiskus 1 pertanyaan. Sehingga total pertanyaan untuk variabel penggelapan pajak terdapat 5 pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Jawaban menunjukkan bahwa penggelapan pajak rendah.

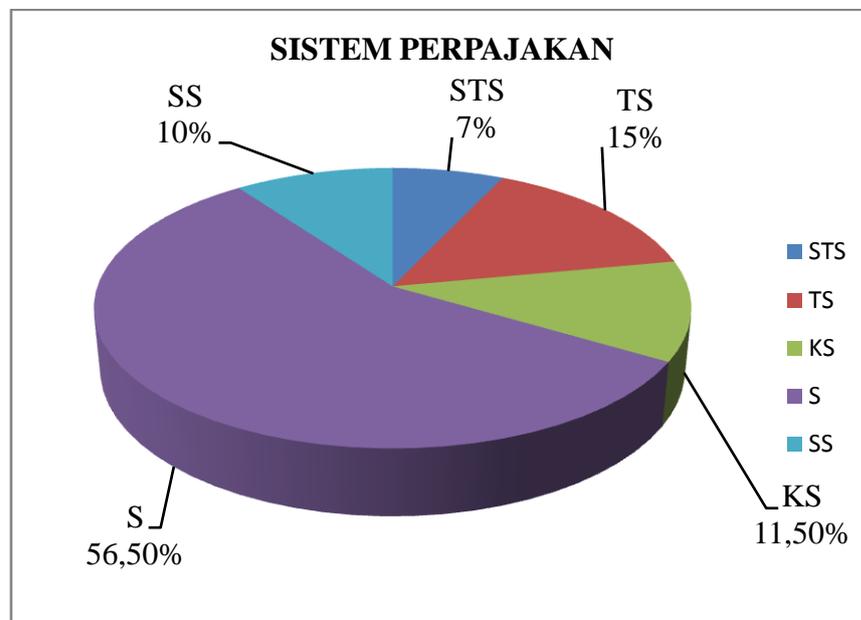
Diperoleh jawaban rendah pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 13,6% dan 7,2%, artinya penggelapan pajak yang digambarkan pada diagram tersebut adalah rendah karena jika dijumlahkan hasilnya 20,8% yang berarti hasil dibawah 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 52,2% dan 25,2% yang jika dijumlahkan yaitu 77,4% yang lebih dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 7,2%.

4. Karakteristik Jawaban Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut ini merupakan gambaran tentang karakteristik jawaban responden berdasarkan pekerjaan yaitu PNS, Karyawan Swasta, Pegawai BUMN, Wirausaha, Lainnya yang terdiri dari variabel sistem perpajakan, tarif pajak, keadilan, diskriminasi dan penggelapan pajak:

a. PNS

1) Sistem Perpajakan (X_1)



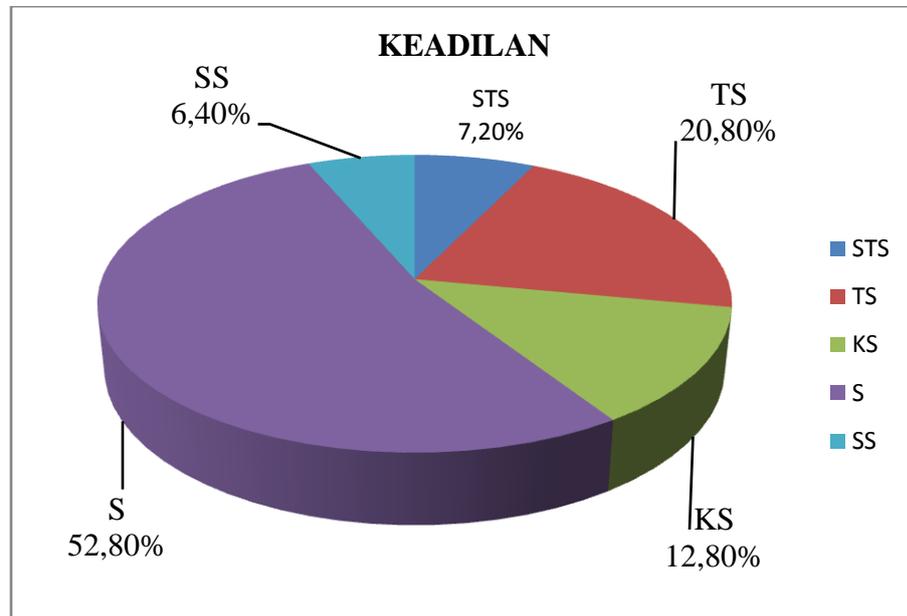
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.10

Persentase Jawaban PNS pada Variabel Sistem Perpajakan

Gambar 4.10 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 50 responden sebagai PNS. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 10% dan 56,5%, artinya prosedur sistem perpajakan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 66,5% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 15% dan 7% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 22%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 11,5%.

2) Variabel Keadilan

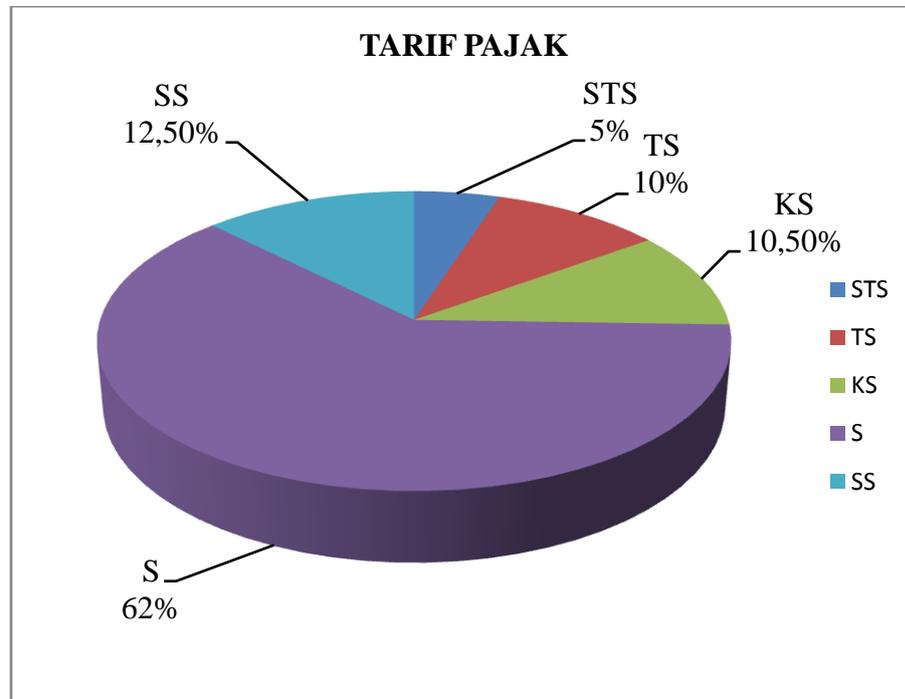


Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.11
Persentase Jawaban PNS pada Variabel Keadilan

Gambar 4.11 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 50 responden sebagai PNS. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 6,4% dan 52,8%, artinya keadilan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 59,2% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 20,8% dan 7,2% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 28%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 12,8%.

3) Variabel Tarif Pajak (X_3)



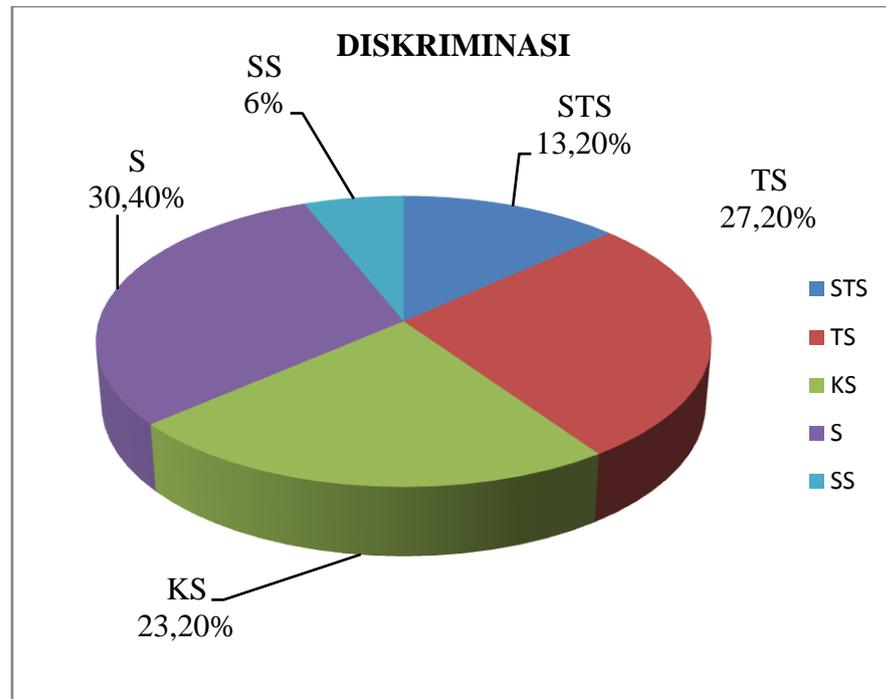
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.12

Persentase Jawaban PNS pada Variabel Tarif Pajak

Gambar 4.12 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 50 responden sebagai PNS. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 112,5% dan 62%, artinya prosedur tarif pajak yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 74,5% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 10% dan 5% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 15%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 10,5%.

4) Variabel Diskriminasi (X_4)

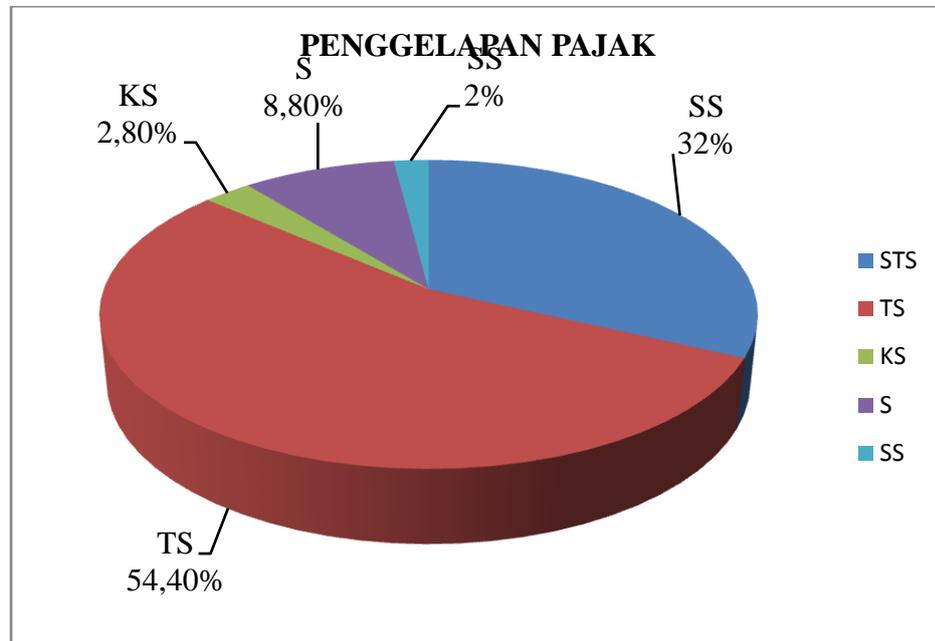


Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.13
Persentase Jawaban PNS pada Variabel Diskriminasi

Gambar 4.13 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 50 responden sebagai PNS. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 23,2% dan 30,4%, artinya diskriminasi yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 53,6% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 27,2% dan 13,2% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 40,4%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 6%.

5) Variabel Penggelapan Pajak



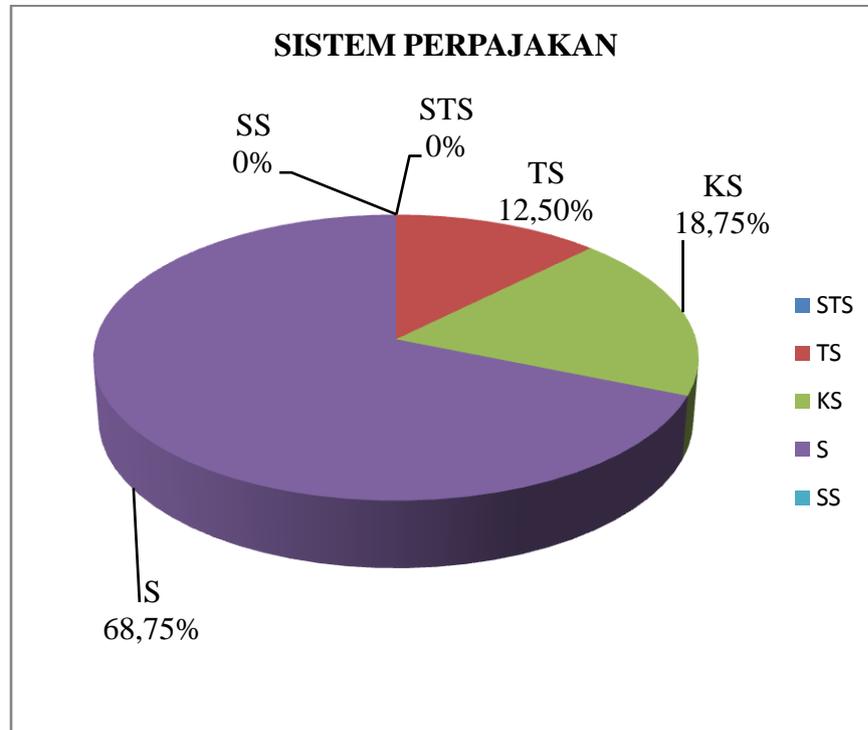
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.14
Persentase Jawaban PNS pada Variabel Penggelapan Pajak

Gambar 4.14 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 50 responden sebagai PNS. Diperoleh jawaban rendah pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 8,8% dan 2%, artinya penggelapan pajak yang digambarkan pada diagram tersebut adalah rendah karena jika dijumlahkan hasilnya 10,8% yang berarti hasil dibawah 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 54,4% dan 32% yang jika dijumlahkan yaitu 86,4% yang lebih dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 2,8%.

b. Karyawan Swasta

1) Variabel Sistem Perpajakan (X_1)



Sumber: Data yang diolah, 2018

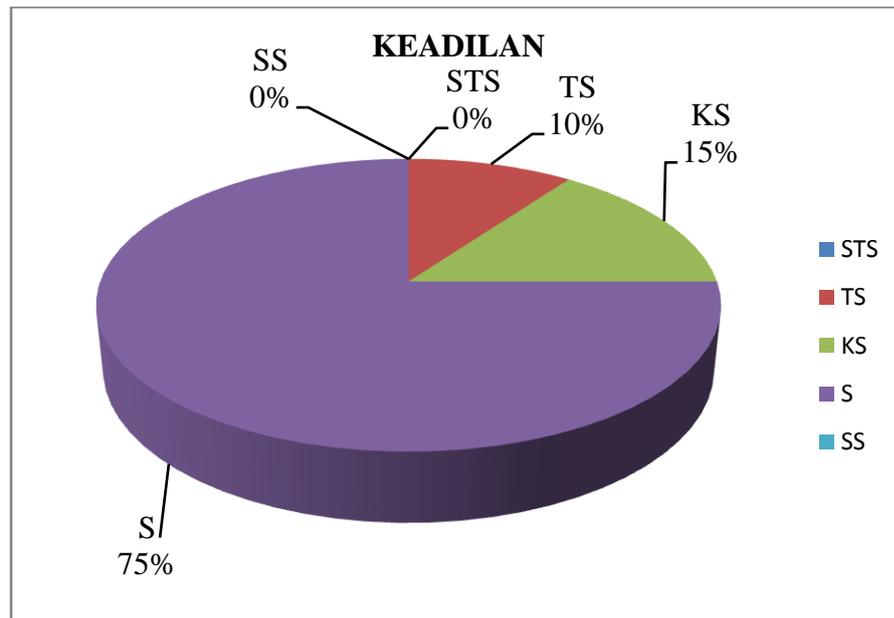
GAMBAR 4.15

Persentase Jawaban Karyawan Swasta pada Variabel Sistem Perpajakan

Gambar 4.15 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 4 responden sebagai Karyawan Swasta. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 0% dan 68,75%, artinya prosedur sistem perpajakan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 68,75% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 12,5% dan 0% yang

dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 12,5%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 18,75%.

2) Variabel Keadilan (X_2)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

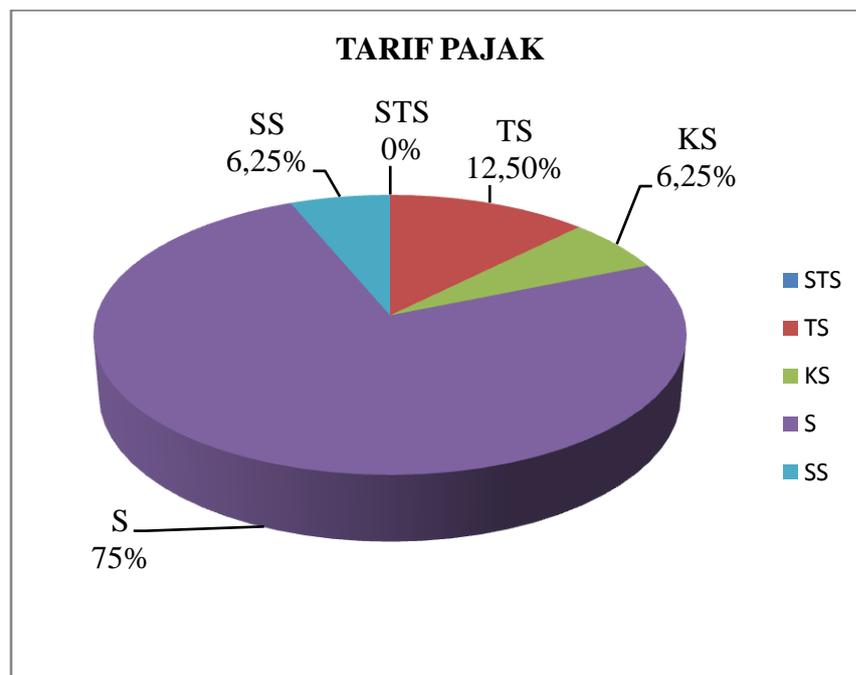
GAMBAR 4.16

Persentase Jawaban Karyawan Swasta pada Variabel Keadilan

Gambar 4.16 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 4 responden sebagai karyawan swasta. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 0% dan 75%, artinya keadilan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 75% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 10% dan 0% yang dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 10%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 15%.

3) Variabel Tarif Pajak (X_3)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

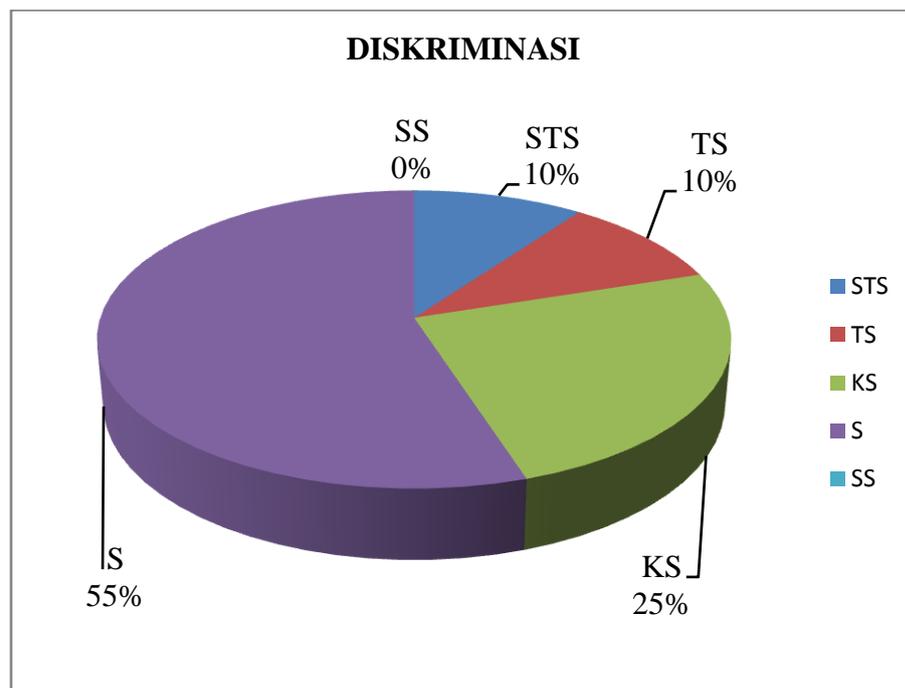
GAMBAR 4.17

Persentase Jawaban Karyawan Swasta pada Variabel tarif pajak

Gambar 4.17 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 4 responden sebagai karyawan swasta. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 6,25% dan 75%, artinya prosedur tarif pajak yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 81,25% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 12,5% dan 0% yang dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 12,5%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 6,25%.

4) Variabel Diskriminasi (X_4)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

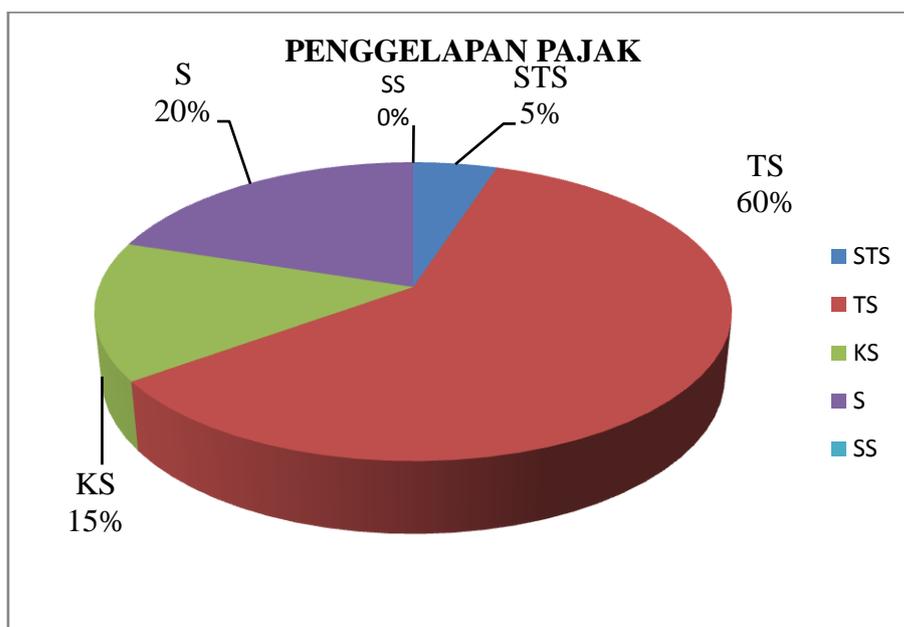
GAMBAR 4.18

Persentase Jawaban Karyawan Swasta pada Variabel Diskriminasi

Gambar 4.18 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 4 responden sebagai karyawan swasta. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 0% dan 55%, artinya diskriminasi yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 55% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 10% dan 10% yang dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 20%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 25%.

5) Variabel Penggelapan Pajak (Y)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.19

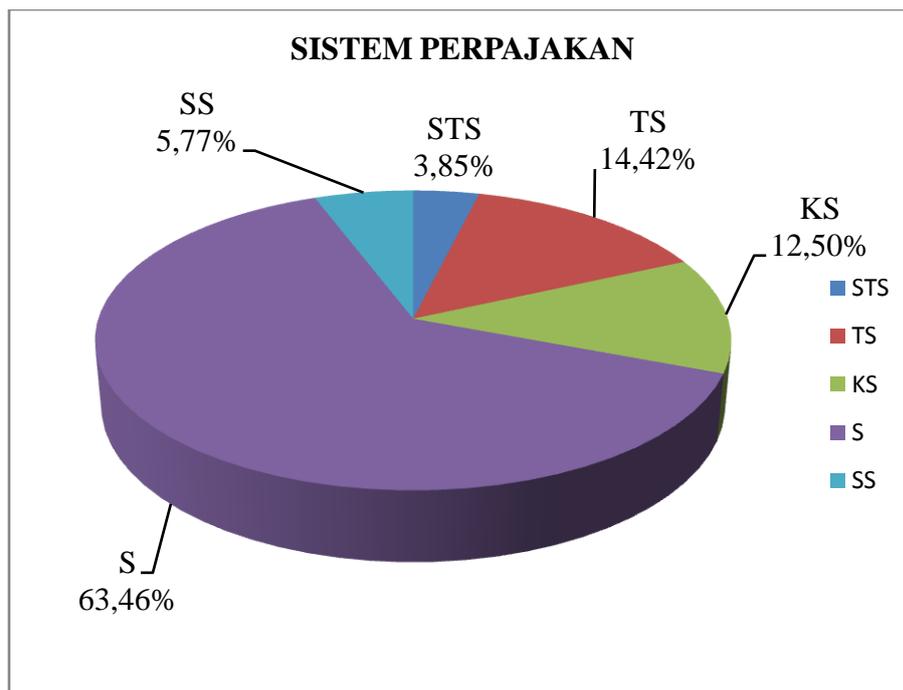
Persentase Jawaban Karyawan Swasta pada Variabel Penggelapan Pajak

Gambar 4.19 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 4 responden sebagai karyawan swasta. Diperoleh jawaban rendah pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 0% dan 20%, artinya penggelapan pajak yang digambarkan pada diagram tersebut adalah rendah karena jika dijumlahkan hasilnya 20% yang berarti hasil dibawah 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 60% dan 5% yang jika dijumlahkan

yaitu 65% yang lebih dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 15%.

c. Pegawai BUMN

1) Variabel Sistem Perpajakan (X_1)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

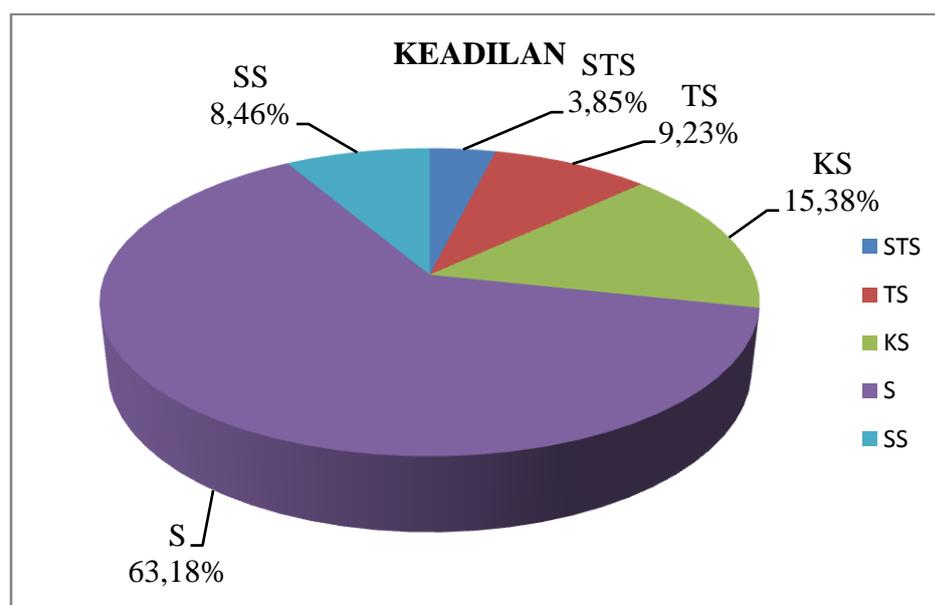
GAMBAR 4.20

Persentase Jawaban Pegawai BUMN pada Variabel Sistem Perpajakan

Gambar 4.20 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 26 responden sebagai pegawai BUMN. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 5,77% dan 63,46%, artinya prosedur sistem perpajakan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 69,22% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom

jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 14,42% dan 3,85% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 18,27%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 12,5%.

2) Variabel Keadilan



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

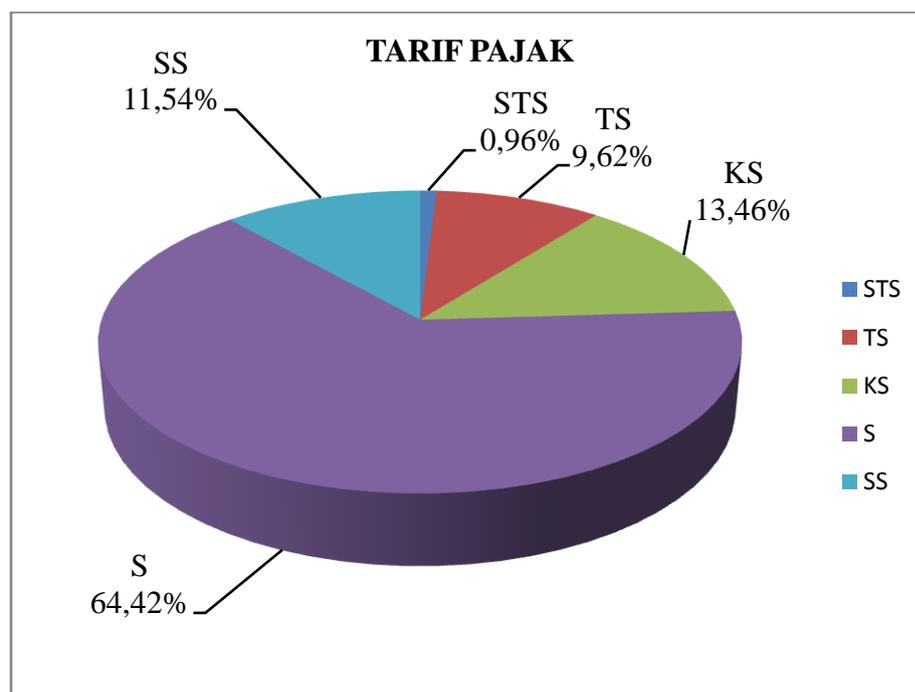
GAMBAR 4.21

Persentase Jawaban Pegawai BUMN pada Variabel Keadilan

Gambar 4.21 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 26 responden sebagai pegawai BUMN. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 63,18% dan 8,46%, artinya keadilan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 71,64% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 9,23% dan 3,85% yang dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 13,08%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 15,38%.

3) Variabel Tarif Pajak



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

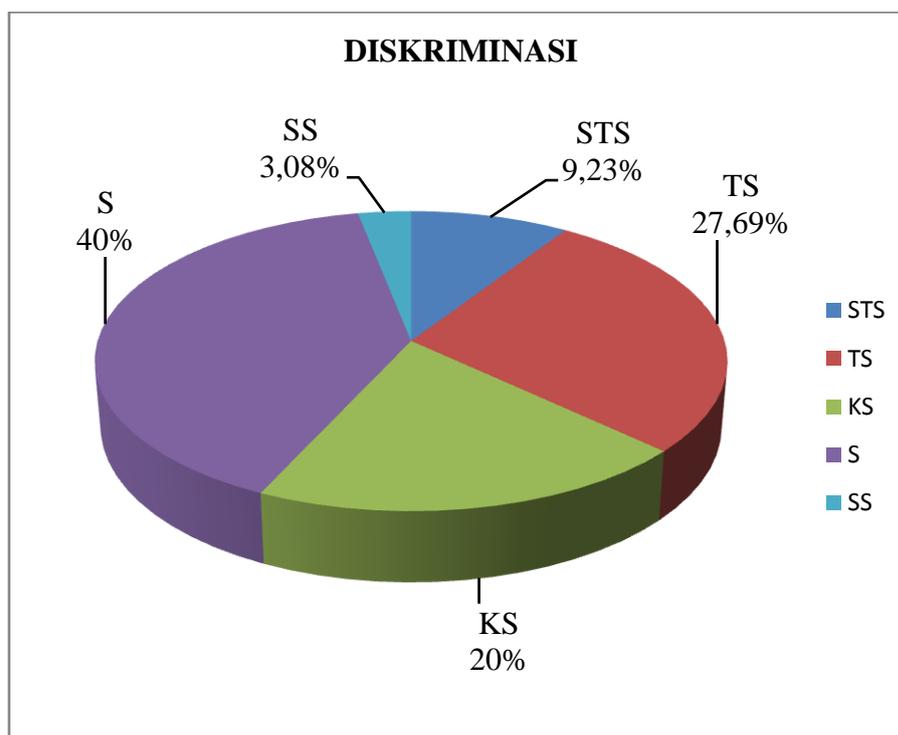
GAMBAR 4.22

Persentase Jawaban Pegawai BUMN pada Variabel Tarif Pajak

Gambar 4.22 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 26 responden sebagai pegawai BUMN. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 64,42% dan 11,54%, artinya prosedur tarif pajak yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 75,96% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 9,62% dan 0,96% yang

dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 10,58%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 13,46%.

4) Variabel Diskriminasi (X_4)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

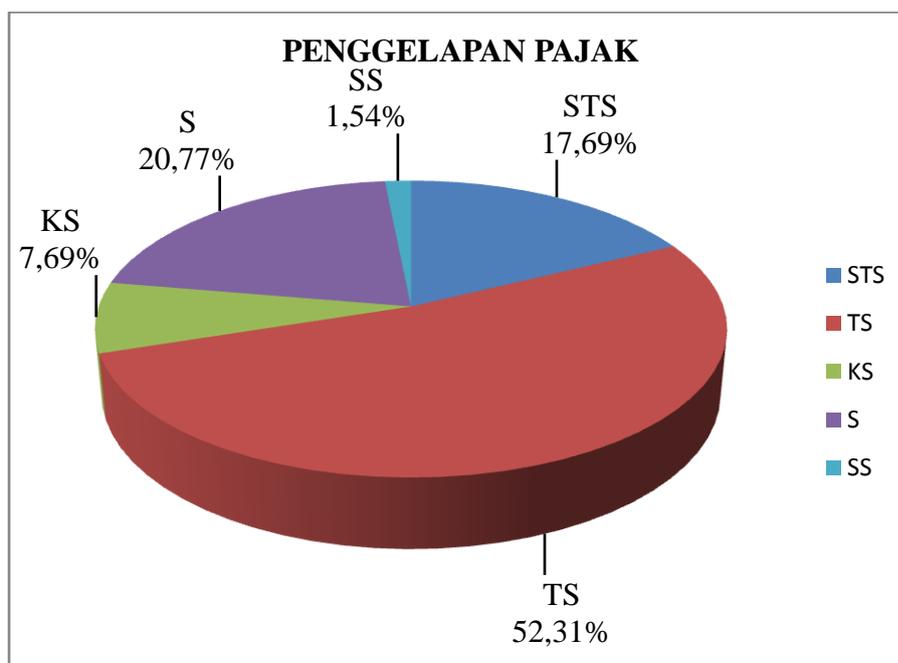
GAMBAR 4.23

Persentase Jawaban Pegawai BUMN pada Variabel Diskriminasi

Gambar 4.23 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 26 responden sebagai Pegawai BUMN. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 20% dan 40%, artinya diskriminasi yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 60% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 27,69% dan 9,23% yang dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 38,92%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 3,08%.

5) Variabel Penggelapan Pajak (Y)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.24

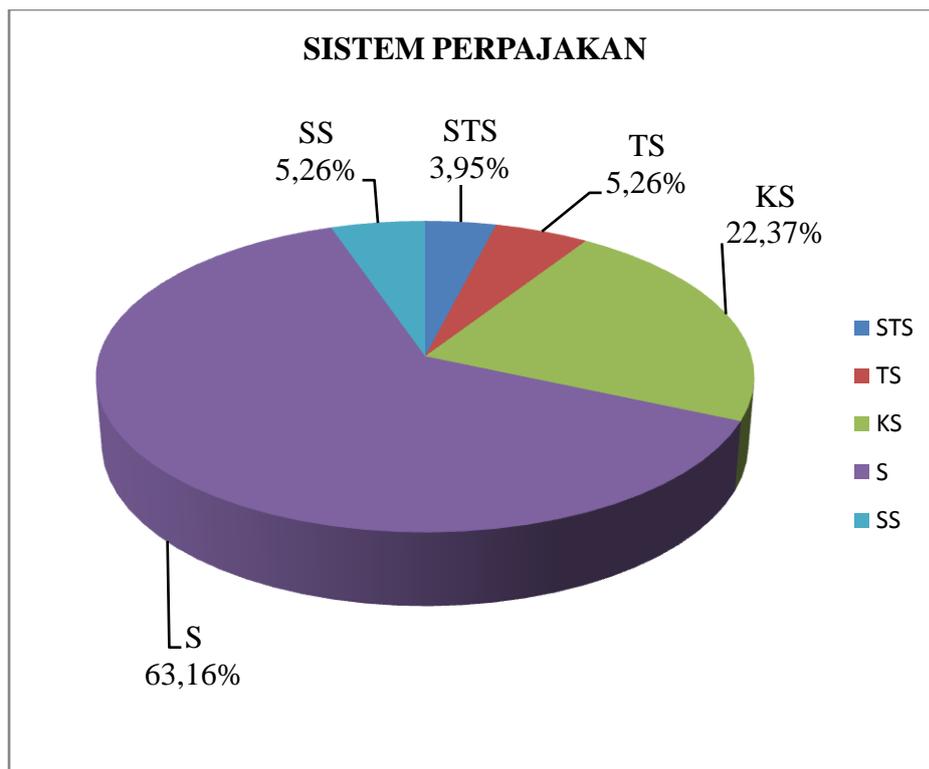
Peresentase Jawaban Pegawai BUMN pada Variabel Penggelapan Pajak

Gambar 4.24 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 26 responden sebagai pegawai BUMN. Diperoleh jawaban rendah pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 1,54% dan 20,77%, artinya penggelapan pajak yang digambarkan pada diagram tersebut adalah rendah karena jika dijumlahkan hasilnya 22,31% yang berarti hasil dibawah 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 52,31% dan 17,69% yang jika

dijumlahkan yaitu 70% yang lebih dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 7,69%.

d. Wirausaha

1) Variabel Sistem Perpajakan (X_1)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

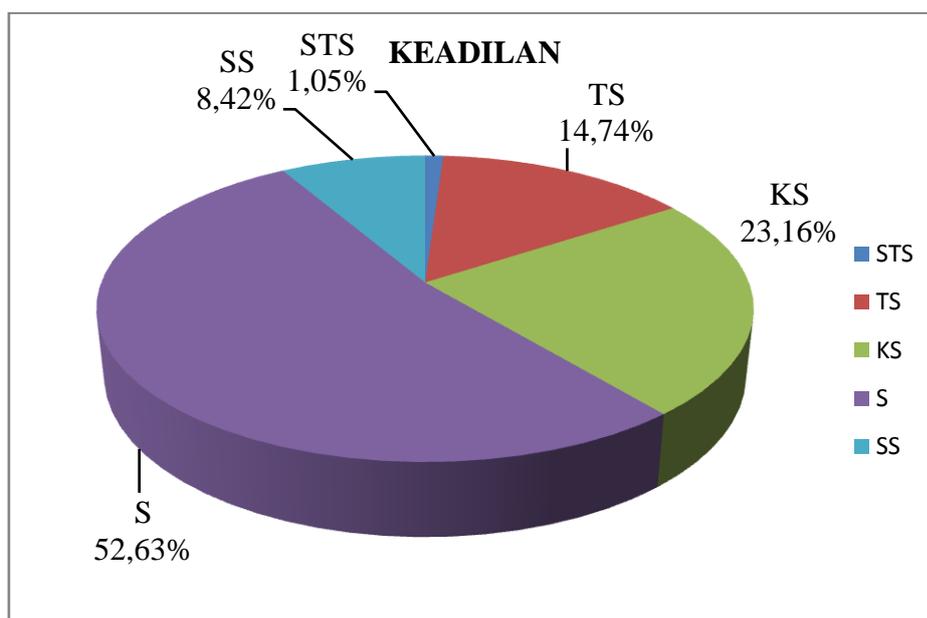
GAMBAR 4.25

Persentase Jawaban Responden Wirausaha pada Variabel Sistem Perpajakan

Gambar 4.25 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 19 responden sebagai Wirausaha. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 5,26% dan 63,16%, artinya prosedur sistem perpajakan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 68,42% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban

tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 5,26% dan 3,95% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 9,21%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 22,37%.

2) Variabel Keadilan (X_2)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

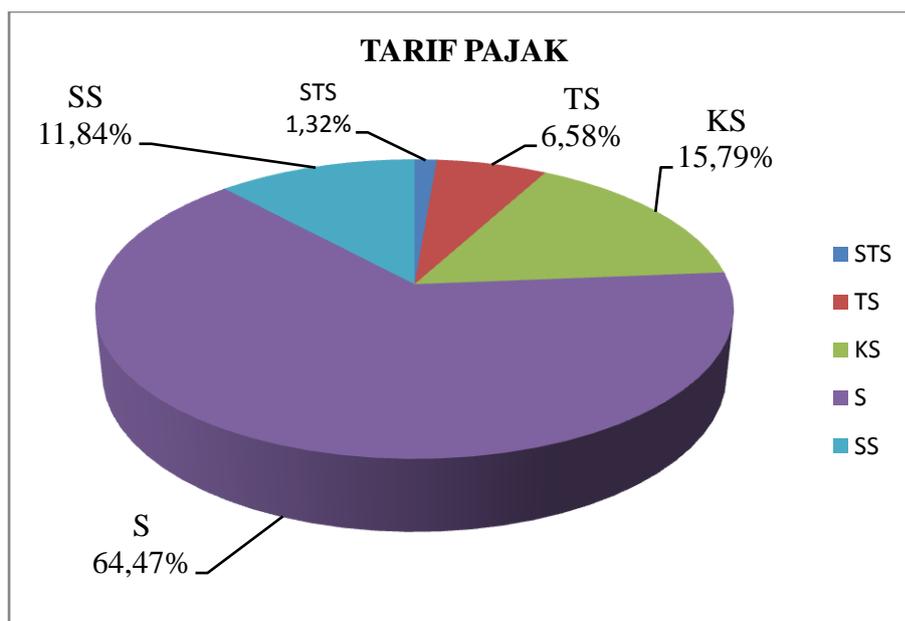
GAMBAR 4.26

Persentase Jawaban Wirausaha pada Variabel Keadilan

Gambar 4.26 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 19 responden sebagai wirausaha. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 52,63% dan 8,42%, artinya keadilan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 61,05% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak

setuju yaitu 14,74% dan 1,05% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50% yaitu 15,79%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 23,16%.

3) Variabel Tarif Pajak (X_3)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

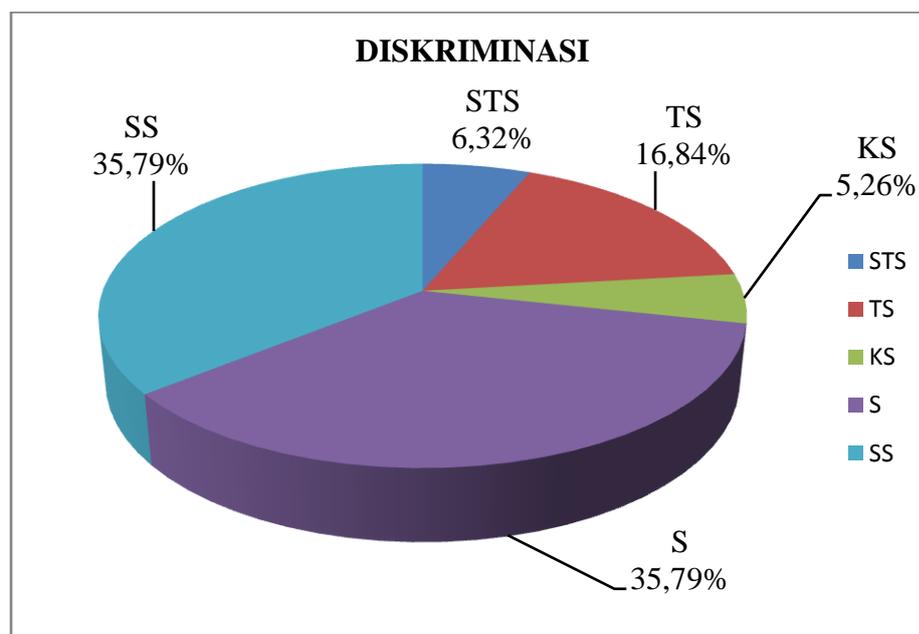
GAMBAR 4.27

Persentase Jawaban Wirausaha pada Variabel Tarif Pajak

Gambar 4.27 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 19 responden sebagai wirausaha. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 64,47% dan 11,84%, artinya prosedur tarif pajak yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 76,31% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 6,58% dan 1,32% yang dijumlahkan

hasilnya kurang dari 50% yaitu 7,9%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 15,79%.

4) Variabel Diskriminasi (X_4)



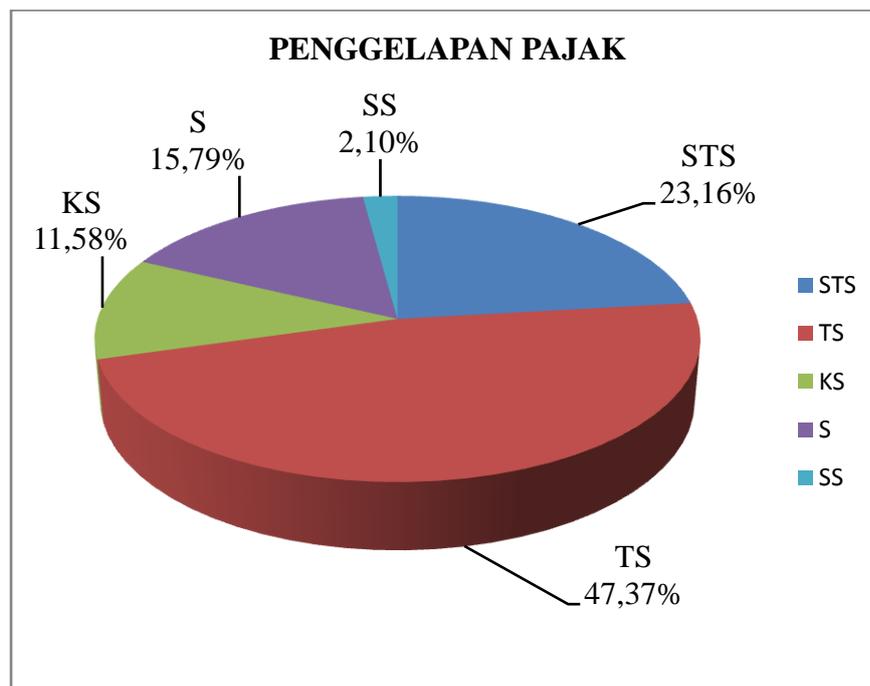
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.28
Persentase Jawaban Wirausaha pada Variabel Diskriminasi

Gambar 4.28 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 19 responden sebagai Wirausaha. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 35,79% dan 35,79%, artinya diskriminasi yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 71,58% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 16,84% dan 6,32% yang dijumlahkan hasilnya kurang

dari 50% yaitu 23,16%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 5,26%.

5) Variabel Penggelapan Pajak



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

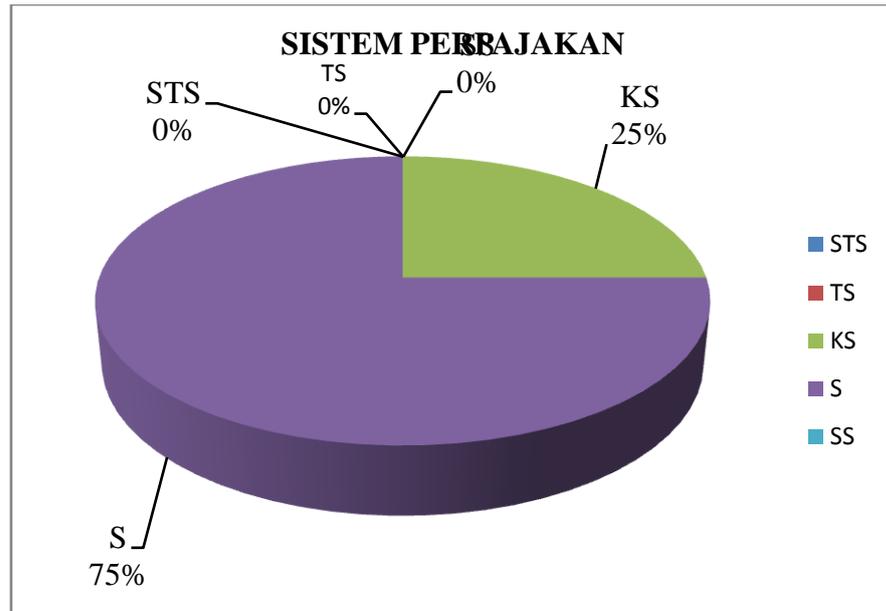
GAMBAR 4.28
Persentase Jawaban Wirausaha pada Variabel Penggelapan Pajak

Gambar 4.28 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 19 responden sebagai wirausaha. Diperoleh jawaban rendah pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 2,10% dan 15,79%, artinya penggelapan pajak yang digambarkan pada diagram tersebut adalah rendah karena jika dijumlahkan hasilnya 17,89% yang berarti hasil dibawah 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 47,37% dan 23,16% yang jika dijumlahkan

yaitu 70,53% yang lebih dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 11,58%.

e. Lainnya

1) Variabel Sistem Perpajakan



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

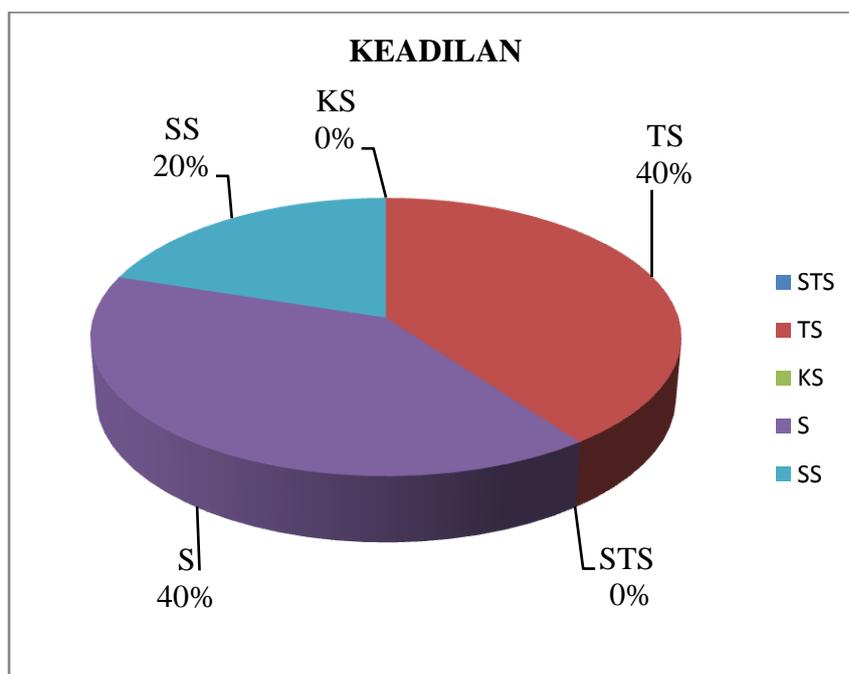
GAMBAR 4.30

Persentase Jawaban Lainnya pada Variabel Sistem Perpajakan

Gambar 4.30 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 1 responden sebagai Lainnya. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 0% dan 75%, artinya prosedur sistem perpajakan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 75% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 0% dan 0% yang dijumlahkan hasilnya

kurang dari 50% yaitu 0%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 25%.

2) Variabel Keadilan (X_2)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

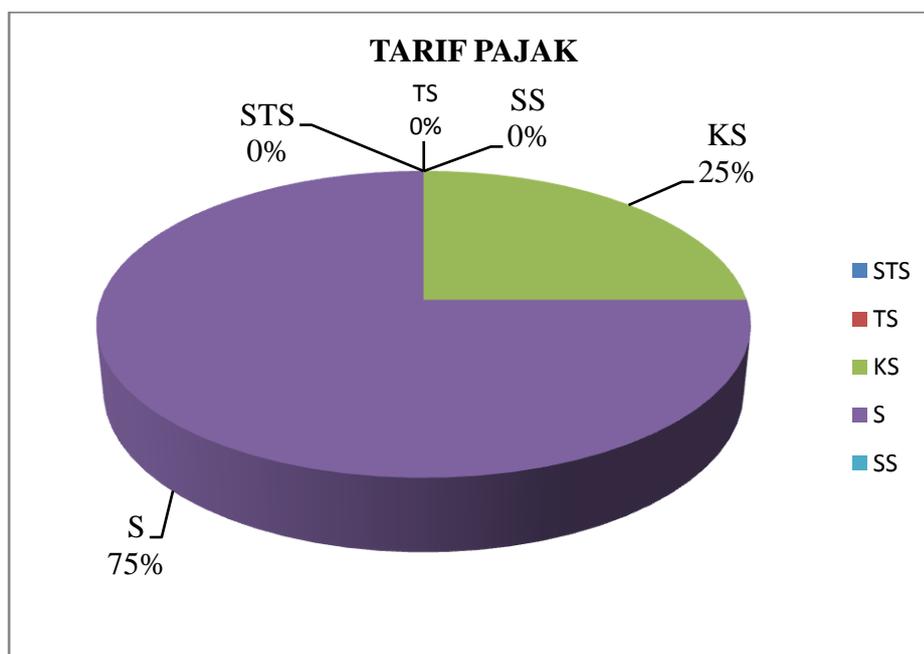
GAMBAR 4.31

Persentase Jawaban Lainnya pada Variabel Keadilan

Gambar 4.31 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 1 responden sebagai lainnya. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 40% dan 20%, artinya keadilan yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 60% yang berarti menunjukkan hasil diatas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 40% dan 0% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari 50%

yaitu 40%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 10%.

3) Variabel Tarif Pajak (X_3)



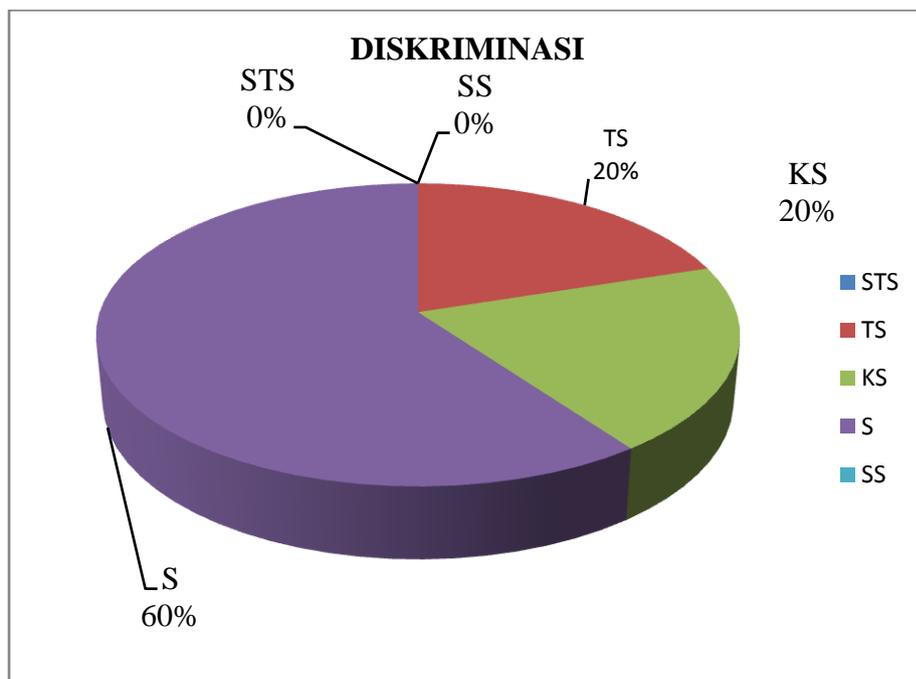
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.32
Persentase Jawaban Lainnya pada Variabel Tarif Pajak

Gambar 4.32 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 1 responden sebagai lainnya. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 0% dan 75%, artinya prosedur tarif pajak yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 75% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 0% dan 0% yang dijumlahkan hasilnya

kurang dari 50% yaitu 0%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 25%.

4) Variabel Diskriminasi (X_4)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

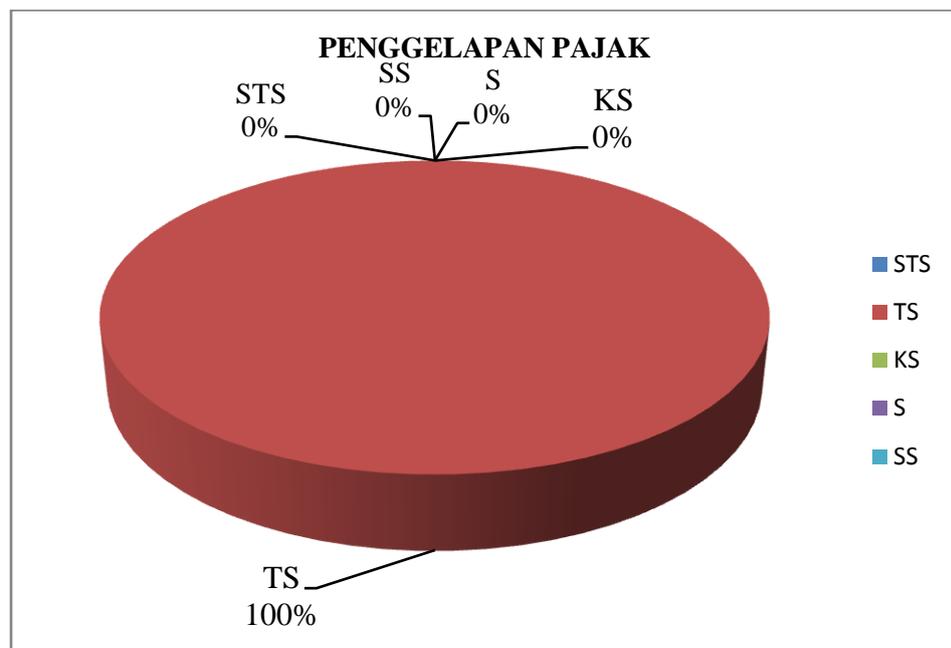
GAMBAR 4.33

Persentase Jawaban Lainnya pada Variabel Diskriminasi

Gambar 4.28 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 1 responden sebagai lainnya. Diperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju yaitu 0% dan 60%, artinya diskriminasi yang digambarkan melalui diagram tersebut tinggi karena jika dijumlahkan hasilnya 60% yang berarti menunjukkan hasil di atas 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 20% dan 0% yang dijumlahkan hasilnya kurang dari

50% yaitu 20%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 20%.

5) Variabel Penggelapan Pajak (Y)



Sumber: Data primer yang diolah, 2018

GAMBAR 4.34

Persentase Jawaban Lainnya pada Variabel Penggelapan Pajak

Gambar 4.34 dapat dilihat dari masing-masing indikator per item pernyataan yang berasal dari 1 responden sebagai lainnya. Diperoleh jawaban rendah pada kolom sangat setuju dan jawaban setuju yaitu 0% dan 0%, artinya penggelapan pajak yang digambarkan pada diagram tersebut adalah rendah karena jika dijumlahkan hasilnya 0% yang berarti hasil dibawah 50%. Sedangkan untuk kolom jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 100% dan 0% yang jika dijumlahkan yaitu 100%

yang lebih dari 50%. Begitu juga dengan kolom kurang setuju yang memiliki hasil kurang dari 50% yaitu 0%.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah responden, nilai maksimum dan nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari data yang diolah.

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	100	6	20	14.04	2.998
Keadilan	100	9	22	16.77	3.038
Tarif Pajak	100	11	20	15.06	2.078
Diskriminasi	100	6	25	15.03	3.053
Tindakan Penggelapan Pajak	100	5	25	11.40	4.316
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Tabel 4.1 merupakan hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 100 sampel. Variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 20 dengan rata-rata 14,04 dan standar deviasi 2,998. Variabel Keadilan memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum 22 dengan rata-rata 16,77 dan standar deviasi 3,038. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum

20 dengan rata-rata 15,06 dan standar deviasi 2,078. Variabel Diskriminasi memiliki nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 25 dengan rata-rata 15,03 dengan standar deviasi 3,053. Variabel Tindakan Penggelapan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 25 dengan rata-rata 11,40 dan standar deviasi sebesar 4,316.

2. Uji Kualitas data

a) Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk menguji apakah tiap tiap pertanyaan telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. Pengujian validitas memakai teknik korelasi *Product Moment*. Variabel dapat dikatakan valid apabila nilai *componentmatrix* lebih dari atau sama dengan 0,50 (Nazaruddin dan Basuki,2016).

Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r-tabel	r-hitung	Keterangan
Sistem Perpajakan	1	0,195	0,923	Valid
	2	0,195	0,928	Valid
	3	0,195	0,901	Valid
	4	0,195	0,922	Valid
Keadilan	1	0,195	0,824	Valid
	2	0,195	0,832	Valid
	3	0,195	0,878	Valid
	4	0,195	0,895	Valid
	5	0,195	0,873	Valid
Tarif Pajak	1	0,195	0,779	Valid
	2	0,195	0,834	Valid
	3	0,195	0,812	Valid
	4	0,195	0,851	Valid
Diskriminasi	1	0,195	0,838	Valid
	2	0,195	0,830	Valid
	3	0,195	0,853	Valid
	4	0,195	0,807	Valid
	5	0,195	0,790	Valid
Tindakan Penggelapan Pajak	1	0,195	0,892	Valid
	2	0,195	0,915	Valid
	3	0,195	0,910	Valid
	4	0,195	0,914	Valid
	5	0,195	0,912	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2018

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan setelah seluruh instrumen telah dilakukan uji validitas dan sudah teruji validitasnya. Dalam uji ini setiap instrumen akan dinilai seberapa tingkat konsistensinya dengan teknik pengukuran menggunakan koefisien *Crombach's Alpha*. Sebuah instrumen dapat dikatakan reliabel moderat ketika nilai alpha antara 0,50-0,70, instrumen reliabel tinggi apabila nilai alpha antara 0,70-0,90, dan instrumen reliabel sempurna apabila nilai alpha >0,90.

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Crombach's Alpha</i>	Standar Reliabel	<i>N of Items</i>	Keterangan
Penggelapan Pajak	0,947	0,70	5	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,938	0,70	4	Reliabel
Keadilan	0,912	0,70	5	Reliabel
Tarif Pajak	0,835	0,70	4	Reliabel
Diskriminasi	0,881	0,70	5	Reliabel

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan *Crombach's Alpha* untuk variabel sistem perpajakan sebesar 0,938, keadilan sebesar 0,912, tarif pajak 0,835, diskriminasi 0,881 dan penggelapan pajak 0,947. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *Crombach's Alpha* > 0,70.

c. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji ini adalah pengujian pertama kali yang dilakukan dalam analisis statistik untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.97312221
	Absolute	.065
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.652
Asymp. Sig. (2-tailed)		.790

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai asymp Sig (2-tailed) yaitu sebesar $0,790 > \alpha 0,05$, karena nilai sig lebih besar dari $\alpha 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi dapat dikatakan bebas multikolinieritas ketika nilai *tolerance* lebih dari 0,1, dan nilai *Variance Inflasi Factor (VIF)* kurang dari 10 yang dilihat dari hasil regresi berganda.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.604	3.610		.998	.321		
Sistem Perpajakan	-.687	.132	-.477	-5.198	.000	.593	1.687
Keadilan	.125	.123	.088	1.023	.309	.671	1.491
Tarif Pajak	.413	.168	.199	2.463	.016	.765	1.307
Diskriminasi	.606	.105	.429	5.783	.000	.908	1.102

a. Dependent Variable: Tindakan Penggelapan Pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa VIF masing-masing variabel memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,1. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai VIF sebesar 1,687 dan nilai *tolerance* 0,593. Variabel keadilan memiliki nilai VIF sebesar 1,491 dan nilai *tolerance* 0,671. Variabel tarif pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,307 dan nilai *tolerance* 1,307. Variabel diskriminasi memiliki nilai VIF sebesar 0,908 dan nilai *tolerance* 1,102. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada data masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang

baik adalah model yang tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Uji yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas ini adalah uji *gletser* yang dilihat dari nilai signifikansi diatas 0,05.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.853	2.119		1.818	.072
SistemPerpajakan	-.115	.078	-.190	-1.482	.142
Keadilan	-.051	.072	-.085	-.707	.481
TarifPajak	-.045	.099	-.052	-.458	.648
Diskriminasi	.109	.062	.183	1.768	.080

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari alpha 0,05. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai sig sebesar 0,142, variabel keadilan memiliki nilai sig sebesar 0,481, variabel tarif pajak memiliki nilai sig sebesar 0,648, variabel diskriminasi memiliki nilai sig sebesar 0,080. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Persamaan Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan variabel independen. Hasil uji t pada tabel tersebut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Nilai Tn
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.604	3.610		.998	.321
1 SistemPerpajaka	-.687	.132	-.477	-5.198	.000
n Keadilan	.125	.123	.088	1.023	.309
TarifPajak	.413	.168	.199	2.463	.016
Diskriminasi	.606	.105	.429	5.783	.000

a. Dependent Variable: TindakanPenggelapanPajak

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil uji nilai t yang menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Penggelapan Pajak} = 3,604 - 0,687 \text{ SP} + 0,125 \text{ KD} + 0,413 \text{ TP} + 0,606 \text{ DK}$$

Persamaan linear regresi berganda dapat diartikan bahwa:

- a. Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel sistem

perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisiensi sebesar -0,687. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sistem perpajakan $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **diterima**.

b. Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel keadilan memiliki tingkat signifikansi 0,309 dengan nilai koefisien sebesar 0,125. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **ditolak**.

c. Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikansi 0,016 dengan nilai koefisien sebesar 0,413. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tarif pajak $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **diterima**.

- d. Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis keempat tentang pengaruh diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari analisis data tersebut diperoleh variabel diskriminasi memiliki tingkat signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien sebesar 0,606. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **diterima**.

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Ket.
1.	Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak	Diterima
2.	Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak	Ditolak
3.	Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak	Diterima
4.	Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak	Diterima

Sumber : data primer yang diolah ,2018

2. Hasil Uji Nilai F

Tabel 4.9
Uji Nilai F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	968.894	4	242.223	26.295	.000 ^b
	Residual	875.106	95	9.212		
	Total	1844.000	99			

a. Dependent Variable: TindakanPenggelpapanPajak

b. Predictors: (Constant), Diskriminasi, SistemPerpajakan, TarifPajak, Keadilan

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Hasil uji nilai F pada tabel 4.9 menunjukkan nilai F sebesar 26,295 dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini.

Tabel 4.10
Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.525	.505	3.035

a. Predictors: (Constant), Diskriminasi, SistemPerpajakan, TarifPajak, Keadilan

Sumber : data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,525 atau 52,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap dependen sebesar 52,5% dan sisanya 47,5% dijelaskan oleh variabel lain.

D. Pembahasan (Interpretasi)

1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama (H_1) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.7 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,005$ dan

nilai (B) -0,687 sehingga H_1 diterima. Hal ini semakin baik pelaksanaan sistem perpajakan yang dilakukan maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan tidak baik sehingga penggelapan akan menurun, artinya:

- a. Wajib Pajak berpersepsi bahwa penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.
- b. Wajib Pajak berpersepsi bahwa penggelapan pajak dianggap tidak etis jika tarif pajak yang dikenakan Wajib Pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan Wajib Pajak.
- c. Wajib Pajak berpersepsi bahwa prosedur sistem perpajakan yang ada sudah memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam meyetorkan pajaknya.
- d. Wajib Pajak berpersepsi bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses Wajib Pajak dalam menyetorkan Pajaknya.

Semakin baik dan mudah prosedur yang digunakan dalam sistem perpajakan maka tindakan penggelapan pajak akan dianggap tidak baik bahkan mampu meminimalisirkan perilaku untuk menggelapkan. Sistem yang dianut di Indonesia adalah *self assessment sistem* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, dan dapat menunjukkan sifat

kegotongroyongannya pajak sebagai wujud kewajiban dan kecintaan kenegaraan setiap anggota masyarakat.

Dengan berbagai akses fasilitas yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya diharapkan masyarakat mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban pajaknya sehingga dapat menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Suminarisasi (2011) , Rahman (2013), Mcgee(2008), Irma (2013), dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian Annisaul (2012), Wahyu dan Supriyadi (2012), dan Handayani (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua (H_2) Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.7 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,309 > \alpha$ 0,05 dan nilai (B) 0,125 sehingga H_2 ditolak. Artinya keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa tindakan penggelapan yang ditimbulkan oleh individu muncul karena

adanya niat untuk berperilaku. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak sudah berlaku adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata terhadap wajib pajak, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, belum tentu penggelapan pajak akan berkurang karena kemungkinan wajib pajak mempunyai kepentingan sendiri seperti ingin memperkaya diri dengan tidak mau membayar pajak bukan karena adanya faktor keadilan, artinya:

- a. Wajib Pajak merasa pajak yang dibayarkan belum sebanding dengan manfaat yang diterima.
- b. Wajib Pajak merasa setiap jenis pajak yang dibayarkan belum sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.
- c. Wajib Pajak merasa beban pajak setiap Wajib Pajak belum sama bagi setiap Wajib Pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
- d. Wajib Pajak berpersepsi bahwa penggelapan pajak tidak etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan Yosi Safri dkk (2014), Permatasari (2014), Suminarsasi (2011), Ardiyaksa dan Friskianti (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian Wicaksono (2014), Handayani (2014) yang

menyatakan keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat tabel 4.7 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,016 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) 0,413 sehingga H_3 diterima. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat, artinya:

- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa penurunan tarif pajak yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak
- b. Wajib Pajak berpendapat bahwa Wajib Pajak akan melakukan kecurangan berupa penggelapan pajak jika merasa tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia tinggi
- c. Wajib Pajak berpendapat bahwa Wajib Pajak sudah merasa mampu membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku
- d. Wajib Pajak berpendapat bahwa tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), Kurniawati (2014), Permatasari (2013), Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, karena pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang wajib pajak sehingga apabila ada kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak maka wajib pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Analisis deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini memperkuat pendapat mengenai semakin tinggi tarif pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka tidak menyetujui apabila terjadi penurunan tarif pajak, maka akan meningkatkan kemampuan seorang wajib pajak dalam emenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Dia menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam hal tindakan penggelapan pajak. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak

yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

4. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis keempat (H_4) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi dapat diketahui dengan melihat hasil tabel 4.7 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) 0,606 sehingga H_4 diterima. hal ini berarti semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dirasakan wajib pajak maka tingkat wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya semakin besar atau tinggi, artinya:

- a. Wajib Pajak berpersepsi bahwa penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan.
- b. Wajib Pajak berpersepsi bahwa penegakan hukum di indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atau tebang pilih.
- c. Wajib Pajak berpersepsi tindakan penggelapan pajak akan dilakukan jika Wajib Pajak merasa terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan.
- d. Wajib Pajak berpersepsi bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.

- e. Wajib Pajak berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan bentuk diskriminasi.

Diskriminasi dalam perpajakan dapat terjadi pada agama, ras atau kebudayaan yang wajib pajak anut, selain itu pada pendapat politik dan kebijakan fiskal juga dapat dianggap suatu bentuk diskriminasi oleh wajib pajak. Jadi, apabila wajib pajak merasakan adanya diskriminasi atau tingkat diskriminasinya tinggi, maka akan meningkatkan pula tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardi *et al* (2016) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Mukharoroh (2014). Ningsih dan Purosari (2015) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Cahyani (2016) dan Rahman (2013) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Marlina (2012) menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian ini yang menyatakan diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.